DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA PONTIANAK

TAHUN 2024 - 2026

# RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

(0561) 883295
http://dppp.pontianak.go.id

# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026 sebagai amanat dari Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tetang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022.

Sebagai bentuk implementasi dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak sesuai Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, dokumen ini menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja Program Pembangunan bidang Pangan, Pertanian, Perikanan dan Peternakan sekaligus meningkatkan peran Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) selama 3 (tiga) tahun ke depan guna mewujudkan tujuan ke-4 RPD Kota Pontianak " Terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing disertai penghidupan yang layak dan pemerataan kesejahteraan".

Kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dari berbagai pihak dalam penyusunan Renstra Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak. Kami juga sangat menghargai kritik dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan dokumen Renstra di masa mendatang

Pontianak, Maret 2023

**DAFTAR ISI**


KATA PENGANTAR ……... i

DAFTAR ISI …….. ii

DAFTAR TABEL …… iii

BAB I PENDAHULUAN ……. 1

I.1 Latar Belakang …… 1

I.2 Dasar Hukum…….. 2

I.3 Maksud dan Tujuan ……. 5

I.4 Sistematika Penulisan……. 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN …… 7

II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah …… 7

II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah …….. 15

II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ……. 18

II.4 Kelompok Sasaran Layanan ……. 26

BAB III PERMASALAHAN DAN ISUSTRATEGIS PERANGKAT DAERAH …... 28

III.1 Permasalahan Pelayanan ……. 28

III.2 Penentuan Isu-isu Strategis …….. 41

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN …….. 46

IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah …… 46

IV.2 Cascading Kinerja …… 50

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN …… 63

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..... 67

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... 86

BAB VIII PENUTUP ..... 88

## DAFTAR TABEL


Tabel 2.1. Daftar Sumberdaya Manusia Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Berdasarkan Golongan Ruang Pangkat ..... 15

Tabel 2.2. Daftar Pejabat Struktural Pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak ..... 15

Tabel 2.3. Daftar Sumberdaya Manusia Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Menurut Tingkat Pendidikan ..... 16

Tabel 2.4. Daftar Pejabat Fungsional Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak ..... 16

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan ..... 21

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan ..... 24

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ……. 30

Tabel 3.2 Isu-isu Strategis ……. 34

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ……. 48

Tabel 4.2 Cascading Kinerja …….. 51

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 2024-2026 ……. 63

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak …… 70

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD ……... 87

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 atau pada Daerah Otonomi Baru (DOB) maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Secara otomatis, kepala Perangkat Daerah (PD) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen tersebut akan digunakan oleh penjabat (Pj) kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sistematika, tahapan, dan tata cara penyusunan dokumen Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, baik evaluasi dokumen Renstra maupun Renja.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan wajib PD melakukan penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 adalah:

1. Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, poin KESATU c.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2021.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.
5. Dokumen Renstra tahun 2024-2026 lebih bersifat visioner dan memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen Renstra Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak untuk dua tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2023 dan 2024.

## 1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 126).

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renstra PD dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Pontianak berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil capaian kinerja (*outcome*) Renstra PD melalui evaluasi capaian Renja PD sampai dengan Tahun 2022, evaluasi keluaran (*output*) sampai dengan Tahun 2022, isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

## 1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraa n tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan tujuan dan sasaran dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami serta menggambarkan keterkaitan elemen-elemen perencanaan dalam suatu tabel/matrik

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi yang terpilih

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Merumuskan program dan Kegiatan prioritas dari masing-masing strategi yang dipilih beserta indikator kinerja dan pagu indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

BAB VIII PENUTUP

# BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN

## 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak merupakan gabungan dua instansi yaitu Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan dan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 yang mulai ditetapkan di tahun 2017. Perubahan struktur organisasi ini diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak,

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak secara umum mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pangan, Pertanian dan Kelautan dan Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. **Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak**

   Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan yaitu merumuskan

kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada dibawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
b. Perumusan rencana kerja dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
c. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
d. Pengendalian dan pembinaan teknis dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pangan, pertanian dan perikanan; dan
f. Pelaksanaan tugas lain dibidang pangan, pertanian dan perikanan yang diberikan oleh Walikota.

**2. Sekretaris Dinas**

Tugas pokok Sekretaris Dinas adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan Teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi di bidang kesekretariatan.

Untuk Melaksanakan Tugas fungsi Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
b. Perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;
c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
d. Monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
e. Pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
f. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
g. Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan

h. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup bidang kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan. Adapun ruang lingkup umum dan kepegawaian dilaksanakan oleh seorang Kasubbag Umum dan Aparatur yang memiliki tugas dan fungsi berikut ini:

**a) Kasubbag Umum dan Aparatur**

Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan aparatur.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kasubbag Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja dibidang umum dan aparatur;
b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang umum dan aparatur berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan ;
c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang umum dan aparatur;
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang umum dan aparatur; dan
e. Pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan aparatur yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas subbagian umum dan aparatur meliputi administrasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga, penataan kelembagaan perangkat daerah, pelayanan data dan informasi, administrasi kepegawaian internal serta pelayanan publik.

**3. Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan**

Tugas Pokok Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan adalah Merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan

pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang ketersediaan, ditribusi dan konsumsi pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
b. Penyusunan program kerja dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
h. Pengelolaan administrasi dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan meliputi ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.

**4. Kepala Bidang Pertanian**

Kepala Bidang Pertanian adalah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang pertanian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pertanian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pertanian;
b. Penyusunan program kerja dibidang pertanian;
c. Penyelenggraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pertanian;
d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang pertanian;
e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pertanian;
f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pertanian;
g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pertanian;
h. Pengelolaan administrasi dibidang pertanian; dan
i. Pelaksanaan tugas lain dibidang pertanian yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang pertanian meliputi pembinaan, penyediaan dan pengawasan budidaya, pasca panen untuk tanaman pangan dan hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

**5. Kepala Bidang Peternakan**

Kepala Bidang Peternakanmempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang peternakan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang peternakan;
b. Penyusunan program kerja dibidang peternakan;
c. Penyelenggraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang peternakan;
d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang peternakan;
e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang peternakan;
f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang peternakan;
g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang peternakan;
h. Pengelolaan administrasi dibidang peternakan; dan

i. Pelaksanaan tugas lain dibidang peternakan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang peternakan meliputi perumusan kebijakan dan penyelenggaraan tentang produksi ternak serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner.

**6. Kepala Bidang Perikanan**

Kepala Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang perikanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 68, Kepala Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perikanan;
b. Penyusunan program kerja dibidang perikanan;
c. Penyelenggraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang perikanan;
d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang perikanan;
e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perikanan;
f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang perikanan;
g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perikanan;
h. Pengelolaan administrasi dibidang perikanan; dan
i. Pelaksanaan tugas lain dibidang perikanan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang perikanan meliputi perumusan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

**7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas**

1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

2) Unit pelaksana teknis dinas sebagaimana pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yang ditentukan lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, susunan organisasi pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas;
   a. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur;
3. Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan;
4. Kepala Bidang Pertanian;
5. Kepala Bidang Peternakan;
6. Kepala Bidang Perikanan;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara rinci struktur organisasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAKNOMOR 126 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGASPOKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANANKOTA PONTIANAK

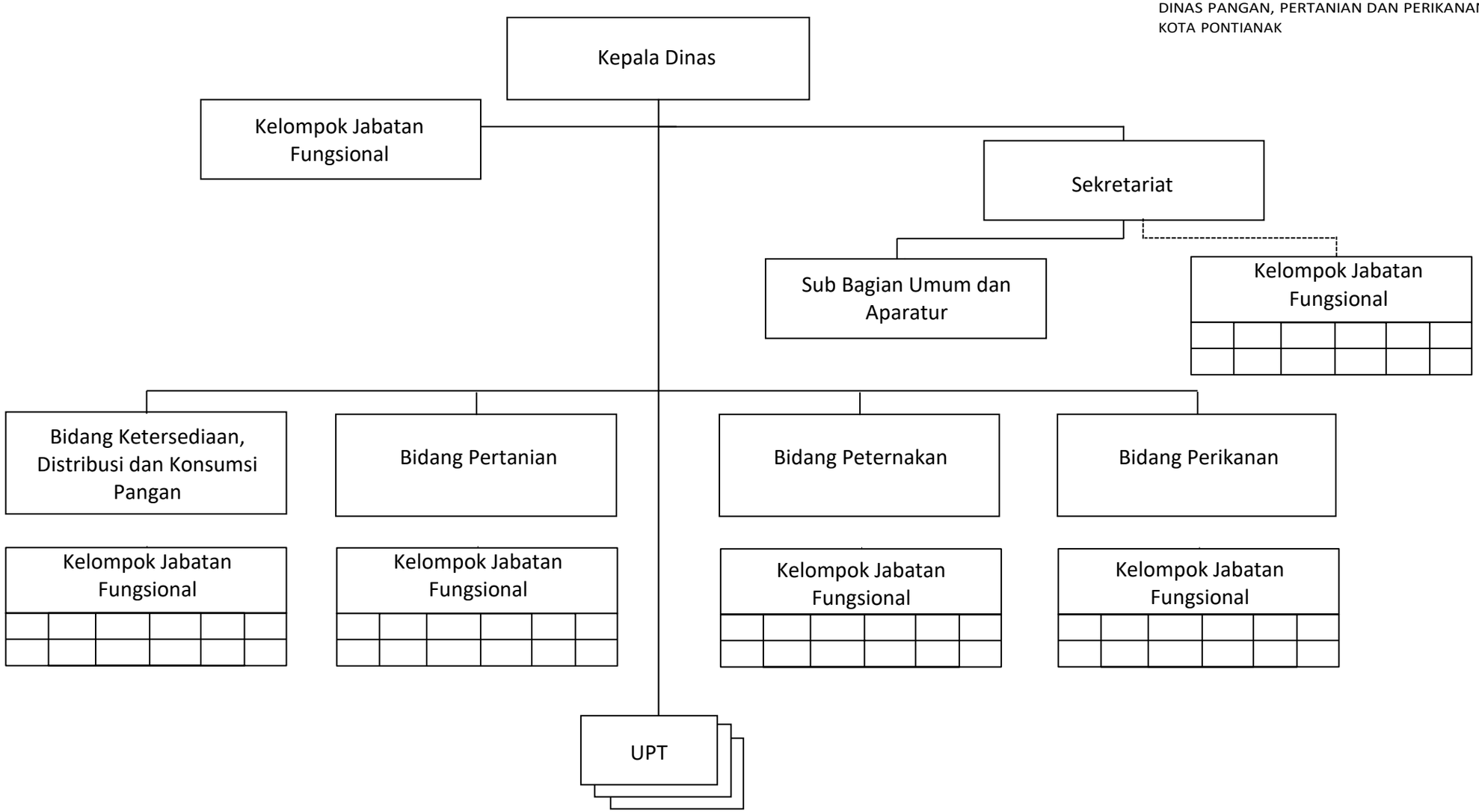

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 1. Sumberdaya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak terdiri dari PNS sebanyak 54 (lima puluh empat) orang dan petugas honor harian sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang. Secara rinci jumlah PNS berdasarkan golongan/ ruang pangkat dapat dilihat pada Tabel berikut ini

**Tabel 2.1. Daftar Sumberdaya Manusia Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Berdasarkan Golongan Ruang Pangkat**

| No | Golongan/Ruang Pangkat | Jumlah (orang) |
|---|---|---|
| 1. | IV (Empat) | 10 |
| 2. | III (Tiga) | 39 |
| 3. | II (Dua) | 2 |
| 4. | Gol.VII | 1 |
| | Jumlah | 54 |

*Ket : Desember 2022*

**Tabel 2.2. Daftar Pejabat Struktural Pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak**

| No | Eselon/Non Eselon | Jumlah (orang) |
|---|---|---|
| 1. | II (Dua) | 1 |
| 2. | III (Tiga) | 5 |
| 3. | IV (Empat) | 0 |
| 4. | Non Eselon | 48 |
| | Jumlah | 54 |

*Ket : Desember 2022*

**Tabel 2.3. Daftar Sumberdaya Manusia Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Menurut Tingkat Pendidikan**

| No | Golongan/Ruang Pangkat | Jumlah (orang) |
|---|---|---|
| 1. | Strata III | - |
| 2. | Strata II | 16 |
| 3. | Strata I | 28 |
| 4. | Diploma | 4 |
| 5. | SLTA/Sederajat | 4 |
| 6. | SLTP/Sederajat | 2 |
| 7. | SD | - |
| | Jumlah | 54 |

*Ket : Desember 2022*

**Tabel 2.4. Daftar Pejabat Fungsional Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak**

| No | Golongan/Ruang Pangkat | Jumlah(orang) |
|---|---|---|
| 1 | Penyuluh Pertanian Madya | 3 |
| 2 | Penyuluh Pertanian Muda | 6 |
| 3 | Penyuluh Pertanian Pertama | 3 |
| 4 | Penyuluh Pertanian Terampil | 1 |
| 5 | Penyuluh Perikana Muda | 1 |
| 6 | Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda | 1 |
| 7 | Analis Ketahanan Pangan Muda | 3 |
| 8 | Analis Kebijakan Muda | 1 |
| 9 | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda | 2 |
| 10 | Pengawas Benih Tanaman Muda | 1 |
| 11 | Medik Veteriner Muda | 1 |
| 12 | Medik Veteriner Pertama | 3 |
| 13 | Paramedik Veteriner Terampil | 1 |
| | **Jumlah** | **27** |

*Ket : Desember 2022*

**2. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Kondisi sarana dan prasarana memegang peranan yang cukup penting dalam membantu aparatur untuk mencapai sasaran Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu instansi harus di registrasikan menurut kode, jenis, jumlah dan kondisi saat ini ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) menurut Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah sebagai berikut :

a) KIB A Tanah

Tanah yang merupakan salah satu aset Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak. Banyaknya jumlah kepemilikan tanah oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak berdasarkan jumlah UPTD dan unit kerja yang dibawahi sebanyak 17 buah. Tentunya kepemilikan tanah ini juga disertai dengan kelengkapan berkas berupa sertifikat kepemilikan, kondisi diatas tanah tersebut saat ini telah berdiri gedung dan bangunan milik Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak.

b) KIB B Mesin dan peralatan

Jumlah mesin dan peralatan sesuai KIB B pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak berjumlah 2.027 buah, memiliki asal usul cara perolehan dengan pembelian sesuai dengan standar harga yang berlaku saat itu dan diikuti dengan spesifikasi bahan serta ukuran sesuai kebutuhan. Selain sebagai sarana dalam melaksanakan tugas administrasi keseharian seperti komputer, printer, meja, kursi dan juga mesin dan peralatan pertanian, termasuk didalamnya adalah peralatan laboratoium kultur jaringan dan laboratorium powder yang berada dibawah UPTD Agribisnis Aloe Vera Center. Kondisi mensin dan peralatan yang didaftarkan kedalam KIB B masih dalam kondisi baik.

c) KIB C Gedung dan bangunan

Sarana dan prasarana yang ikut memiliki peranan penting adalah gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan yang berdiri ini tentunya memiliki spesifikasi konstruksi tertentu yaitu seperti bertingkat atau tidak dan menggunakan beton atau tidak. Gedung dan bangunan yang terdaftar sesuai denga KIB C berjumlah 228 buah, dan bangunan masih daalam kondisi baik

d) KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan

Salah satu sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi pokok Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah jalan, irigasi dan jaringan. Dalam hal ini sarana inilah yang memfasilitasi pelaksanaan tugas sehari-hari, seperti jalan yang berfungsi sebagai penghubungan antar tujuan, irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan air sesuai kebutuhan dan jaringan lainnya seperti jaringan listrik dan telepon. Jumlah jalan, irigasi dan jaringan yang terdafatar pada KIB D berjumlah 125 buah dengan kondisi Baik

e) KIB E Aset Tetap Lainnya

Induk Ikan dan Benih Tanaman termasuk dalam kategori Aset Tetap lainnya karena diperoleh dengan cara pembelian, diantaranya yaitu induk ikan arwana, koi dan benih tanaman lengkeng. Jumlah aset tetap lainnya yang terdaftar pada KIB E sebanyak 10.624 buah.

## 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak 2020 - 2022 :

- Ketersediaan energi dan protein dapat memenuhi kebutuhan karena tersedianya bahan pangan yang cukup sehingga ketersediaan energi dan protein dapat melebihi standar nasional, namun tetap harus dilakukan pemantauan pasokan pangan

- Ketersediaan bahan pangan di Kota Pontianak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, namun Pola konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam dan bergizi seimbang. Melakukan sosialisasi dan promosi pola konsumsi yang bergizi dan seimbang dan aman dan Peningkatan Akses pangan masyarakat terutama pada masyarakat ekonomi lemah.
- Tercapainya sasaran produksi dan produktivitas pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura) karena adanya dukungan masyarakat petani dan penyuluh pertanian. Kerjasama yang baik dengan penyuluh pertanian dan masyarakat petani tetap dipertahankan dan ditingkatkan agar produksi setiap tahunnya terus meningkat. Kecuali untuk produksi lidah buaya dan pepaya sangat jauh dari target terutama untuk tahun 2022, hal ini diakibatkan pandemi covid yg terjadi tahun 2020 s/d 2021 yang mengakibatkan banyak industri rumah tangga tutup, yang notabene industri rumah tangga merupakan pangsa terbesar yang menyerap produksi yang dihasilkan petani.
- Target sasaran tidak tercapai/ realisasi secara umum untuk ketersediaan daging sapi, ayam, kambing, babi, dan itik rendah karena kurangnya betina produktif sebagai sasaran program upsus siwab, terbatasnya lahan untuk peternakan sapi, masuknya wabah PMK (Penyakit dan Mulut Kuku) pada ternak sapi yang ada sehingga mengakibatkan turunnya angka pemasukan sapi potong dari luar Provinsi, RPH Nipah Kuning beralih fungsi menjadi SPALD-T, sehingga jumlah pemotongan sapi tercatat menurun diduga pemotngan dilakukan diluar rumah potong hewan Pemerintah/ tidak tercatat dan adanya pemasukan daging sapi beku dari luar Kota Pontianak, lokasi rumah potong unggas terbesar (RPU AdilMart) pindah lokasi ke Kabupaten Kubu Raya sehingga mempengaruhi jumlah produksi/ pemotongan unggas, masuknya wabah ASF yang menyerang pada babi sudah masuk ke wilayah Kalimantan Barat menyebabkan jumlah kematian yang tinggi dan berakibat pada kekurangan stok babi hidup yang akan dipotong, pengetahuan dan kepedulian para pelaku usaha dalam penyediaan pangan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal masih kurang

misalnya ditandai dengan adanya beberapa pengusaha yang melakukan pemotongan sapi di Tempat Pemotongan Hewan (TPH) ilegal yang notabene tidak diawasi untuk menghindari penarikan retribusi, Terbatasnya penganggaran yang ada dalam peningkatan pembangunan peternakan di daerah karena sektor peternakan menjadi urusan pilihan sehingga pembangunannya tidak optimal. Solusi yang dipersiapkan untuk menghadapi permasalahan ini adalah membangun kembali RPH sapi di lokasi yang baru agar pemotongan ternak sapi dapat di awasi dan tercatat, memperhatikan kembali jumlah penganggaran untuk pembangunan peternakan secara khusus dan OPD secara umum agar indikator yang telah di targetkan dapat tercapai.

- Realisasi Produksi Perikanan Budidaya mencapai target yang di tetapkan karena adanya dukungan masyarakat pembudidaya ikan dan penyuluh perikanan. Kerjasama yang baik dengan penyuluh perikanan dan masyarakat pembudidaya ikan tetap dipertahankan dan ditingkatkan agar produksi setiap tahunnya terus meningkat, terutama untuk memanfaatkan lahan pekarangan untuk memelihara ikan.
- Realisasi Produksi Perikanan tangkap rendah dari target disebabkan masih terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap nelayan Perairan Umum Daratan (PUD), Sebagian besar armada tangkap adalah sampan bermotor berukuran lebih kecil dari 1 GT perairan umum daratan dan kondisi sampan bermotor nelayan PUD sudah banyak yang tidak layak beroperasi.

## Tabel II.1

## PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun | | | | | Realisasi Capaian pada Tahun | | | | | Rasio Capaian pada Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* |
| 1 | Ketersediaan energi dan protein perkapita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Ketersediaan Energi per Kapita (Kkal/Kapita/ Hari) | | | | 2.800 | 2.900 | 2.950 | 3.000 | 3.000 | 2.910 | 2.910 | 2.962 | | | 1,04 | 1,00 | 1,00 | | |
| | - Ketersediaan Protein per Kapita (Gr/Kapita/ Hari) | | | | 65 | 85 | 95 | 105 | 105 | 103,21 | 100,23 | 107,63 | | | 1,59 | 1,18 | 1,13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Peningkatan skor pola pangan harapan (konsumsi) | | | | 82 | 84 | 85 | 86 | 86 | 79 | 79,20 | 77,60 | | | 0,97 | 0,94 | 0,91 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Produktivitas Padi | | | | 32,45 | 33,99 | 35,54 | 37,08 | 38,63 | 36,84 | 36,40 | 36,94 | | | 1,14 | 1,07 | 1,04 | | |
| | - Produktivitas Ubi Kayu | | | | 203,87 | 209,81 | 215,74 | 221,68 | 227,62 | 219,69 | 208,27 | 219,69 | | | 1,08 | 0,99 | 1,02 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Produktivitas Keladi | | | | 147,00 | 154,00 | 161,00 | 168,00 | 175,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | | | 0,95 | 0,91 | 0,87 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Produksi Tanaman Hortikultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Produksi Sawi (Ton) | | | | 867,44 | 918,17 | 959,41 | 1.001,64 | 1.043,38 | 1.448,40 | 1.422,00 | 1.554,00 | | | 1,67 | 1,55 | 1,62 | | |
| | - Produksi Bayam (Ton) | | | | 1.103,55 | 1.156,10 | 1.208,65 | 1.261,20 | 1.313,75 | 1.052,30 | 964,00 | 1.063,00 | | | 0,95 | 0,83 | 0,88 | | |
| | - Produksi Kangkung (Ton) | | | | 2.025,14 | 2.636,09 | 2.712,53 | 2.834,60 | 2.962,16 | 2.094,40 | 1.957,00 | 2.164,00 | | | 1,03 | 0,74 | 0,80 | | |
| | - Produksi Pepaya (Ton) | | | | 10.641,75 | 13.088,82 | 13.468,39 | 14.074,47 | 14.707,82 | 8.860,84 | 9.520,00 | 4.714,00 | | | 0,83 | 0,73 | 0,35 | | |
| | - Produksi Lidah Buaya (Kg) | | | | 11.600.433,89 | 19.859.840,00 | 20.435.775,36 | 21.355.385,25 | 22.316.377,59 | 15.590.470,00 | 14.663.446,00 | 1.852.443,00 | | | 1,34 | 0,74 | 0,09 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Produksi Daging (Kg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Produksi Daging Sapi | | | | 1.104.120,00 | 1.115.161,20 | 1.126.202,40 | 1.137.243,60 | 1.148.284,80 | 853.205,00 | 702.186,00 | 652.766,00 | | | 0,77 | 0,63 | 0,58 | | |
| | - Produksi Daging Kambing | | | | 119.949,00 | 121.148,49 | 122.347,98 | 123.547,47 | 124.746,96 | 126.717,00 | 95.382,00 | 92.890,00 | | | 1,06 | 0,79 | 0,76 | | |
| | - Produksi Daging Ayam | | | | 8.819.653,00 | 8.907.849,53 | 8.996.046,06 | 9.084.242,59 | 8.172.439,12 | 5.954.005,00 | 4.843.853,00 | 4.148.427,00 | | | 0,68 | 0,54 | 0,46 | | |
| | - Produksi Daging Itik | | | | 93.977,00 | 94.916,77 | 95.856,54 | 96.796,31 | 97.736,08 | 91.116,00 | 94.738,00 | 77.333,00 | | | 0,97 | 1,00 | 0,81 | | |
| | - Produksi Daging Babi | | | | 967.924,00 | 977.603,24 | 987.282,48 | 996.961,72 | 1.006.640,96 | 1.100.313,00 | 857.421,00 | 713.291,00 | | | 1,14 | 0,88 | 0,72 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | | | | 210,00 | 213,00 | 219,00 | 222,00 | 222,00 | 228,93 | 219,00 | 223,68 | | | 1,09 | 1,03 | 1,02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Produksi tangkap laut | | | | 820 | 710,00 | 766,97 | 805,29 | 805,33 | 541,24 | 554,57 | 512,50 | | | 0,66 | 0,78 | 0,67 | | |
| | - Produksi perairan umum daratan | | | | 51,50 | 115,50 | 121,72 | 124,15 | 126,63 | 94,33 | 90,42 | 210,87 | | | 1,83 | 0,78 | 1,73 | | |

## Tabel II.2

## ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN

| No | Uraian | Anggaran pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran (%) | Realisasi (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* |
| **1** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | - | 10.852.502.470 | 10.354.769.606 | 10.573.826.952 | | - | 10.113.360.310 | 9.975.056.029 | | | | 93% | 96% | | | -1,24 | -1,37 |
| **2** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | - | 232.706.170 | 253.618.244 | 413.037.980 | | - | 215.608.179 | 233.328.300 | | | | 93% | 92% | | | 35,92 | 8,22 |
| **3** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | - | 130.327.650 | 114.969.376 | - | | - | 112.794.500 | 96.537.400 | | | | 87% | 84% | | | -55,89 | -14,41 |
| **4** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | - | 34.411.000 | 86.497.600 | 42.500.000 | | - | 32.264.450 | 82.777.207 | | | | 94% | 96% | | | 50,25 | 156,56 |
| **5** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | - | 46.065.250 | 182.570.400 | 69.400.000 | | - | 42.746.000 | 178.923.900 | | | | 93% | 98% | | | 117,17 | 318,57 |
| **6** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | - | 1.051.198.740 | 538.971.800 | 817.284.400 | | - | 1.021.346.273 | 537.441.850 | | | | 97% | 100% | | | 1,45 | -47,38 |
| **7** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | - | 44.009.380 | 8.063.000 | - | | - | 42.037.000 | 7.902.975 | | | | 96% | 98% | | | -90,84 | -81,20 |
| **8** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | - | 2.233.999.957 | 2.084.721.780 | 1.633.019.684 | | - | 2.224.854.436 | 2.072.324.772 | | | | 100% | 99% | | | -14,17 | -6,86 |
| **9** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | - | 1.809.794.705 | 1.038.213.174 | 3.416.465.960 | | - | 1.792.082.140 | 1.031.778.057 | | | | 99% | 99% | | | 93,22 | -42,43 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | - | 91.426.607 | 221.875.280 | 495.294.000 | | - | 90.327.429 | 212.324.800 | | | | 99% | 96% | | | 132,96 | 135,06 |
| **11** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | - | 2.075.113.534 | 915.483.655 | 1.902.709.916 | | - | 2.038.832.464 | 912.627.076 | | | | 98% | 100% | | | 25,98 | -55,24 |

Dari hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja dari 5 (lima) sasaran strategis Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak pada tahun 2020 s/d 2022 diperoleh capaian yang bervariasi, karena masing-masing indikator yang diukur memiliki instrumen yang berbeda dalam hal pengukuran capaian kinerja dan banyak faktor yang mempengaruhi hasil capaian, baik itu yang berasal dari stakeholder yang berkecimpung didalamnya maupun faktor dari luar yang tidak bisa dengan mudah dibendung. Disinilah kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan diperlukan secara maksimal dengan terus berinovasi mencari cara yang lebih efisien dalam usaha mencapai target-target kinerja sasaran yang ingin dicapai. Secara umum, capaian kinerja sasaran tahun 2020 s/d 2022 tidak terlalu jauh mengecewakan dari yang sudah ditargetkan. Semua pencapaian sangat di dukung oleh kinerja stakeholder yang berkecimpung didalamnya, salah satunya Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai sumber daya aparatur, kemudian pelaku usaha pangan, pertanian, perikanan dan peternakan. Selain dukungan stakeholder, dukungan yang paling penting adalah program dan kegiatan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan. Besarnya realisasi belanja operasi juga diikuti dengan besarnya realisasi indikator kinerja pada masing-masing program dan kegiatan.

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

a. **Kelompok Tani** adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk peningkatan pengembangan usaha. Kelompok tani sebagai pelaku utama menjadi salah satu kelembagaan pertanian yang berperan penting dan menjadi ujung tombak dalam pembangunan pertanian;
b. **Kelompok perikanan** adalah kumpulan para pelaku utama yang terdiri dari nelayan, pembudi daya ikan, dan pengolah ikan yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta di dalam lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang ketua kelompok pelaku utama perikanan;

c. **Pelaku usaha** adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan peternakan;
d. **Organisasi Kemasyarakatan** adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan;
e. **Masyarakat umum** yang berhubungan dengan pertanian, perikanan dan peternakan;
f. **Instansi Pemerintah** yang berhubungan dengan pertanian, perikanan dan peternakan

# BAB III
# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 3.1. Permasalahan Pelayanan

1. Permasalahan Pembangunan Bidang Pangan

   Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan bidang pangan,sebagai berikut :

   a. Sebagian besar ketersediaan/ pasokan bahan pangan tergantung pada pasokan pangan dari luar daerah (perdagangan antar pulau).
   b. Meningkatnya harga pangan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
   c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan mutu dan keamanan pangan.
   d. Belum tercapainya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) sesuai dengan komposisi pola pangan harapan.
   e. Masih terdapat masyarakat yang rawan pangan dan gizi.

2. Permasalahan Pembangunan Bidang Pertanian

   Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan bidang pertanian, sebagai berikut :

   a. Beberapa komoditas pertanian memberikan andil yang cukup signifikan pada inflasi di Kota Pontianak seperti cabe, bawang merah, sawi, kangkung dan bayam.
   b. Adanya pembatasan pupuk bersubsidi sesuai dengan Permentan No. 10 Tahun 2022 tentang cara penetapan alokasi dan HET pupuk bersubsidi sektor pertanian.
   c. Database petani dan kelompok tani belum berbentuk spasial polygon.

3. Permasalahan Pembangunan Bidang Peternakan

   Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan bidang peternakan, sebagai berikut :

   a. Masuknya wabah PMK (Penyakit dan Mulut Kuku) pada ternak sapi yang ada sehingga mengakibatkan turunnya angka pemasukan sapi potong dari luar Provinsi.
   b. RPH Nipah Kuning beralih fungsi menjadi SPALD-T, sehiingga jumlah pemotongan sapi tercatat menurun diduga pemotngan dilakukan diluar rumah potong hewan Pemerintah/tidak tercata.
   c. Lokasi rumah potong unggas terbesar (RPU AdilMart) pindah lokasi ke Kabupaten Kkubu Raya sehingga mempengaruhi jumlah produksi/pemotonganunggas.
   d. Masuknya wabah ASF yang menyerang pada babi sudah masuk ke wilayah Kalimantan Barat menyebabkan jumlah kematian yang tinggi dan berakibat pada kekurangan stok babi hidup yang akan dipotong.
   e. Pengetahuan dan kepedulian para pelaku usaha dalam penyediaan pangan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal masih kurang misalnya ditandai dengan adanya beberapa pengusaha yang melakukan pemotongan sapi di Tempat Pemotongan Hewan (TPH) ilegal yang notabene tidak diawasi untuk menghindari penarikan retribusi.
   f. Penataan pemotongan unggas yang memenuhi aspek Aman, Sehat, Utuh, danHalal dan higiene sanitasi masih menjadi tugas tersendiri bagi Pemerintah Daerah.
   g. Terbatasnya penganggaran yang ada dalam peningkatan pembangunan peternakan di daerah karena sektor peternakan menjadi urusan pilihan sehingga pembangunannya tidak optimal.

4. Permasalahan Pembangunan Bidang Perikanan

   Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan bidang perikanan, sebagai berikut:

   a. Terbatasnya alat tangkap yang dimiliki nelayan khususnya alat tangkapBubu ikan.
   b. Aktifitas penangkapan ikan terkendala oleh cuaca sehingga nelayan tidakbisa melaut karena cuaca buruk.
   c. Terjadinya inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
   d. Pandemi Covid-19 yang masih terjadi membatasi ruang gerak baik petugas maupun pelaku usaha perikanan budidaya dalam proses pembinaan.

**Tabel III. 1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| 1 | ***Sasaran 1 : Meningkatnya Ketahanan Pangan*** | | |
| | Ketersediaan energi dan protein dapat memenuhi kebutuhan | 1. Tersedianya bahan pangan yang cukup sehingga ketersediaan energi dan protein dapat melebihi standar Nasional ketersediaan pangan ( 2.400 Kkal/ Kap/ Hari) | Pemantauan Pasokan Pangan agar ketersediaan pangan di Kota Pontianak selalu terjaga |
| | Target IKU Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak tahun 2022 sebesar 85 %, dengan capaian realisasi sebesar 76,60, dengan demikian capian kinerja sebesar 91,29% masih masuk kategori sangat berhasil | Pola konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam dan bergizi seimbang sesuai komposisi pola pangan harapan yang ideal | 1. Sosialisasi dan promosi pola konsumsi yang bergizi dan seimbang dan aman<br>2. Peningkatan Akses pangan masyarakat terutama pada masyarakat ekonomi lemah |
| 2 | ***Sasaran 2 : Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan dan Produksi Tanaman Hortikultura*** | | |
| | Realisasi produktivitas tanaman padi dan ubi kayu tercapai melebihi | Secara Keseluruhan realisasi produktivitas tanaman pangan telah | Tetap bekerjasama dengan masyarakat petani agar hasil produksi setiap tahunnya meningkat. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | target sasaran kinerja dinas | tercapai kecuali tanaman keladi | |
| | Realisasi produktivitas tanaman keladi tidak mencapai target sasaran kinerja dinas | Belum tercapainya target produktivitas yang telah ditetapkan pada komoditas tanaman keladi sebagai akibat faktor iklim sehingga pertanaman keladi terendam dan adanya penyakit bercak daun | 1. Sosialisasi hal penyakit tanaman keladi bersama POPT Kota Pontianak<br>2. Memperkenalkan varietas keladi yang baru sebagai substitusi var. Keladi yang lama |
| | Realisasi produksi tanaman bayam tidak mencapai target sasaran kinerja dinas | Menurunnya produksi dipengaruhi oleh adanya penyakit pada tanaman bayam | 1. Sosialisasi hal peyakit tanaman bayam bersama POPT Kota Pontianak<br>2. Sosialisasi perbaikan rotasi tanaman (managemen kebun) |
| | Realisasi produksi tanaman kangkung tidak mencapai target sasaran kinerja dinas | Menurunnya produksi dipengaruhi oleh adanya penyakit pada tanaman kangkung | 1. Sosialisasi hal peyakit tanaman kangkung bersama POPT Kota Pontianak<br>2. Sosialisasi perbaikan rotasi tanaman (managemen kebun) |
| | Realisasi produksi tanaman pepaya tidak mencapai target sasaran kinerja dinas | Menurunnya produksi dipengaruhi oleh pertanaman pepaya yang terendam sehingga tanaman gagal produksi | 1. Sosialisasi perbaikan managemen kebun (saluran/drainase)<br>2. Koordinasi dengan OPD terkait tentang perbaikan saluran pembuangan (parit) yang terhubung dengan areal pertanaman pepaya |
| | Realisasi produksi tanaman lidah buaya tidak mencapai target sasaran kinerja dinas | Rendahnya tingkat capaian produksi dikarenakan berkurangnya luas pertanaman dan luas panen sebagai akibat berkurangnya permintaan produksi oleh pelaku usaha | Melakukan koordinasi dengan OPD terkait baik di tingkat Kota, Provinsi maupun tingkat Pusat tentang peningkatan promosi dan pemasaran |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | pengolahan sebagai akibat pandemi covid 19 | |
| 3 | ***Sasaran 3 : Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan*** | | |
| | Target sasaran produksi daging sapi, ayam, kambing dan babi tidak tercapai | Beberapa kendala dan penyebab tidak tercapainya target produksi tahun 2022, antara lain :<br>1. Lokasi rumah potong unggas terbesar di kota Pontianak (RPU Adilmart) pindah lokasi ke Kabupaten Kubu Raya sehingga mempengaruhi jumlah produksi/ pemotongan unggas.<br>2. RPH Nipah Kuning dibongkar, sehingga jumlah pemotongan sapi tercatat menurun, diduga pemotongan dilakukan diuar rumah potong hewan pemerintah/tidak tercatat<br>3. Masuknya wabah PMK (Penyakit dan Mulut Kuku) pada ternak sapi yang yang mengakibatkan turunnya angka pemasukan sapi potong dari luar provinsi<br>4. Masuknya wabah ASF yang menyerang pada babi sudah masuk ke wilayah Kalimantan Barat menyebabkan jumlah kematian yang tinggi dan berakibat pada kekurangan stok babi hidup yang akan dipotong. | Adapun solusi yang dilakukan yaitu :<br>Melakukan kerja sama dengan Kabupaten lain untuk pasokan ayam<br>Memberikan tempat pemotongan untuk pemotongan di Wilayah Kecamatan Pontianak Kota, Barat, Selatan dan Tenggara dengan membangun RPH di Jl. Bedikari Pal Lima<br>Melakukan vaksinasi dan pengobatan pada ternak, memebrikan rekomendasi pemasukan ternak dengan syarat dan ketentuan<br>Memberikan rekomendasi pemasukan ternak babi dengan syarat dan ketentuan |
| 4 | ***Sasaran 4 : Meningkatnya Produksi Hasil Kelautan dan Perikanan*** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Reallisasi total produksi hasil tangkapan Perairan Umum Daratan (PUD) mencapai target | 1. Aktifitas penangkapan ikan di perairan umum daratan tidak terlalu berpengaruh terhadap gelombang tinggi sehingga nelayan masih dapat melakukan aktifitasnya<br>2. Adanya penambahan KUB nelayan | 1. Secara kontinu melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada KUB<br>2. Meningkatkan kelembagaan kelompok agar hasil produksi meningkat |
| | Realisasi Total Produksi Perikanan Laut tidak mencapai target | 1. Terbatasnya alat tangkap yang dimiliki nelayan khususnya alat tangkap Bubu ikan.<br>2. Aktifitas penangkapan ikan terkendala oleh cuaca sehingga nelayan sering tidak bisa melaut karena cuaca buruk<br>3. Terjadinya inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM) | 1. Memfasilitasi KUB dengan memberikan sarana dan prasarana penangkapan ikan.<br>2. Memberikan informasi kepada nelayan data perkiraan cuaca dari BMKG secara rutin agar nelayan dapat mengantisipasi jadwal keberangkatan nelayan<br>3. Memfasilitasi kepengurusan administrasi BBM bersubsidi bagi nelayan. |
| 5 | ***Sasaran 5 : Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya*** | | |
| | Realisasi Produksi Perikanan Budidaya melebihi dari target | Meningkatnya minat masyarakat untuk melakukan usaha budidaya ikan | Secara kontinu melakukan pembinaan kepada pokdakan dan masyarakat yang ingin berusaha dibidang budidaya perikanan, terutama memanfaatkan pekarangan untuk budidaya ikan |

Tujuan dan Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian periode Tahun 2020-2024 adalah :

**Tujuan Kementerian Pertanian :**

A. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan, dengan indikator :

- Global Food Security Index (GFSI) dengan target skor 64 (Th. 2020) dan 69,8 (Th. 2024),
- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan target 90,4 (Th. 2020) dan 95,2 (Th. 2024),
- Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan target 2.100 Kkal/kapita/hari pada tahun 2024,
- Angka Kecukupan Protein (AKP) dengan target 57 gram/kapita/hari pada tahun 2024,
- Prevelence of Under-nourishment/PoU (Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan) dengan target 6,2 % (Th. 2020) dan 5,0 % (Th. 2024),
- Food Insecutiry Experience Scale/FIES (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) dengan target senilai 5,2 (Th. 2020) dan nilai 4,0 (th. 2024),
- Ketersediaan beras dengan target 39,2 juta ton (th. 2020) dan 46,8 juta ton (th. 2024),
- Ketersediaan protein hewani dengan target 2,5 juta ton (Th. 2020) dan 2,9 juta ton (Th.2024),
- Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi dengan target 10-20% penerima BPNT (Th.2020) dan 100% (Th. 2024),
- Persentase pangan organik dengan target 5% (Th.2020) dan 20% (Th.2024).
- NTP dengan target 103 (Th. 2020) dan 105 (Th. 2024).

B. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian, dengan indikator:

- Nilai tambah per tenaga kerja dengan target Rp.49,2 Juta/Tenaga kerja (Th. 2020) dan Rp.59,8 juta/tenaga kerja (Th.2024),
- Peningkatan PDB Pertanian Sempit dengan target 3,36% (Th. 2020) dan 3,76% (Th. 2024),

- Pertumbuhan PDB Perkebunan dengan target 4,9% (Th. 2020) dan 5,0% (Th. 2024),
- Pertumbuhan PDB Hortikultura dengan target 5,8% (Th. 2020) dan 6 % (Th.2024),

C. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian, dengan indikator :
- Teknologi yang diterapkan oleh Petani dengan target 65 - 80 % (Th. 2020) dan 80-95 % (Th.2024).

D. Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian, dengan indikator :
- Persentase SDM Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya dengan target 60% (Th. 2020) dan 90 % (Th.2024).

E. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian, dengan indikator :
- Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dengan target skor 79,96 (Th.2020) dan 82,96 (Th. 2024),
- Opini BPK RI dengan target WTP hingga 2024.

**Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pertanian :**

- SS1. Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
  1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri
  2. Peningkatan Akses Pangan
  3. Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas
  4. Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan
  5. Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani
  6. Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis
  7. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan
  8. Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan

9. Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian
10. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian

- SS2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian
  1. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian
  2. Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional
- SS3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian
  1. Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan
  2. Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi
- SS4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional
  1. Persentase SDM Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya
  2. Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya
- SS5. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel
  1. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian
  2. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian

Tujuan dan Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan periode Tahun 2020-2024 adalah :

**Tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan :**

A. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, yakni:
   - Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan Perikanan.
   - Menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan

B. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional, yakni:
   - Optimalnya pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap.
   - Meningkatnya mutu, daya saing dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.

- Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- Meningkatnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
- Optimalnya pengelolaan ruang laut.

C. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yaitu optimalnya konservasi dan keanekaragaman hayati.

D. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, dengan tujuan Meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

**Sasaran Strategis (SS) Kementerian Kelautan dan Perikanan :**

- SS1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat
  a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024.
- SS2. "Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat
  a. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7,9% pada tahun 2020 menjadi 8,71% pada tahun 2024.
  b. Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 8,00 miliar pada tahun 2024.
  c. Konsumsi ikan, dari 56,39 kg/kapita/thn pada tahun 2020 menjadi 62,05 kg/kapita/thn pada tahun 2024
- SS3. Sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
  a. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman dari ≤64% pada tahun 2020 mejadi ≤80% pada tahun 2024.
  b. Luas kawasan konservasi perairan, dari 23,40 juta ha pada tahun 2020 menjadi 26,90 juta ha pada tahun 2024
- SS4. Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat
  a. Lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI, dari 17.175 orang pada tahun 2020 menjadi 19.546 orang pada tahun 2024
  b. Kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kelasnya, setiap tahun minimal sebanyak 1.500 kelompok selama tahun 2020-2024

- SS5. Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan
  a. Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan, dari 5 hasil riset pada tahun 2020 menjadi 15 hasil riset pada tahun 2024
- SS6. Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab
  a. WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola, dari 3 WPP pada tahun 2020 menjadi 11 WPP pada tahun 2024
  b. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir, dari 24 Rencana Zonasi pada tahun 2020 menjadi 102 Rencana Zonasi pada tahun 2024
  c. Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, dari 94% pada tahun 2020 menjadi 98% npada tahun 2024
- SS7. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing
  a. Produksi perikanan, dari 26,46 juta ton pada tahun 2020 menjadi 32.75 juta ton pada tahun 2024.
  b. Produksi garam nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024.
  c. Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil, dari Rp2,8 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,2 triliun pada tahun 2024
  d. Kawasan kluster sentra produksi perikanan budidaya unggulan, dari 5 kawasan pada tahun 2020 menjadi 50 kawasan pada tahun 2024
- SS8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif
  a. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing, dari 54,18% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024;
  b. Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan 93% dari tahun 2020 hingga 2024
  c. Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan dari 77% pada tahun 2020 menjadi 82% pada tahun 2024.
  d. Persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan, dengan target 93% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024
- SS9. Tatakelola pemerintahan yang baik

a. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari 80 pada tahun 2020 menjadi 84 pada tahun 2024
b. Indeks Profesionalisme ASN dari 72 pada tahun 2020 menjadi 76 pada tahun 2024.
c. Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,6 pada tahun 2020 menjadi 4,2 pada tahun 2024
d. Indikator level maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) 3 dari tahun 2020 hingga 2024.
e. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024
f. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2020 hingga 2024
g. Indikator Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KKP, dari A (82) pada tahun 2020 menjadi AA (90) pada tahun 2024

Pada Renstra Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak tahun 2024-2026, memiliki tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuan Renstra tahun 2024-2026 Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, adalah **" Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan"** dengan sasaran untuk masing- masing bidang : 1) Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan dengan sasaran "Meningkatnya Ketahanan Pangan", 2) Bidang Perikanan dengan sasaran "Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan", 3) Bidang Pertanian dengan sasaran "Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan dan Produksi Tanaman Hortikultura" dan 4) Bidang Peternakan dengan sasaran "Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan".

Berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2013 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013-2033 pasal 31 kawasan peruntukan lainnya adalah:

1. Kawasan peruntukan pertanian meliputi:
   a. kawasan peruntukan pertanian hortikultura seluas 775 hektar di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara;
   b. kawasan peruntukan peternakan seluas kurang lebih 170 hektar di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara;
2. Kawasan peruntukan perikanan meliputi:
   a. Kawasan perikanan budidaya meliputi sepanjang kanan kiri tepianSungai Kapuas mulai dari persimpangan Sungai Kapuas-Sungai Landak sampai Kelurahan Parit Mayor dan sepanjang kanan kiri tepian Sungai Landak sampai Kelurahan Siantan Hulu;
   b. Pusat Pemasaran Ikan Hias (Raiser) sebagai pusat pengembangan bibit ikan hias yang berdaya jual tinggi yang berlokasi di jalan Parit Pangeran
   c. Balai Benih Ikan selanjutnya disingkat (BBI) sebagai wadah pendistribusian benih ikan air tawar di Kalimantan Barat yangberlokasi di Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur;

Berdasarkan pola ruang yang tertuang pada RTRW Kota Pontianak, kegiatan pertanian potensial Kota Pontianak dialokasikan di Kecamatan Pontianak Utara. Potensi utama yang ditonjolkan adalah komoditas pertanian yang mencirikan Kota Pontianak seperti lidah buaya (Aloe Vera), sayuran daun, Pepaya dan lain-lain. Selain itu pengembangan kawasan sentra agribisnis juga diharapkan akan saling melengkapi pengembangan pariwisata Khatulistiwa Kota Pontianak selain mendorong percepatan hasil produksi dan pengembangan wilayah. Alokasi pemanfaatan ruang untuk kawasan sentra agribisnis seluas ± 800 Ha (7,42 %). Sampai dengan saat ini penggunaan lahan pada Kawasan Sentra Agribisnis mencapai 254,5 Ha (31.67%) dengan rincian pemanfaatan untuk kawasan Lidah Buaya,Pepaya dan Jagung 198,5 Ha, Kawasan Tanaman Kacang-Kacangan, dan Sayuran Dataran Rendah 42 Ha, Kawasan Peternakan 5 Ha, Kawasan RPH dan Puslitbang Terpadu 6 Ha, Kawasan Sub Terminal Agribisnis 2 Ha, Kawasan Pendidikan dan Kesehatan seluas 1 Ha, berbagai program dan kegiatan prioritas sebagai bentuk pelayanan SKPD telah dan akan dilakukan pada kawasan tersebut.

1. Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan subsektor Iainnya sebagai komponen usahatani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses industri hulu sampai hilir. Kawasan budidaya peternakan pada saat ini relatif semakin sulit dijumpai di tingkat kabupaten/kota, karena kompetisi penggunaan Iahan semakin tinggi dan dukungan pemerintah daerah yang terbatas. Di lain pihak, kebutuhan dan konsumsi daging semakin meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan usia serta kesejahteraan penduduk yang semakin baik.
2. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tertuang di dalam RTRW Kota Pontianak digunakan sebagai kawasan pengembangan pertanian dan penghijauan Kota Pontianak yang sejalan dengan visi Kepala Daerah Kota Pontianak.

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang sangat strategis dan potensial. Hal ini didukung Kota Pontianak di lalui oleh 2 (dua) sungai besar yakni sungai kapuas dan sungai landak, yang tepiannya dapat ditata dan dimanfaatkan untuk budidaya berbagai jenis ikan air tawar denga menggunakan keramba apung maupun tancap. Balai Benih Ikan dengan luas ± 1,4 Ha di Jalan Rais Rahman Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur sebagai *core* atau inti kawasan perikanan budidaya, selain itu dalam mendukung pengembangan ikan hias yang memiliki penggemar cukup banyak di Kota Pontianak, telah dibangun Pusat Ikan Hias (Raiser) seluas ± 2 Hektar tepatnya di Jalan Parit Pangeran Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara.

## 3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak tersebut di atas serta dinamika permasalahan di lapangan, maka isu-isu strategis Dinas dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Pangan, pertanian, dan perikanan di Kota Pontianak masih dihadapkan pada beberapa isu aktual dan strategis yaitu :

**Tabel III.2: Isu-isu Strategis**

| No | Judul Isu | Statement Isu | Pengaruh |
|---|---|---|---|
| 1. | Terbatasnya lahan pertanian dan terjadinya alih Fungsi Lahan Pertanian | Lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian menyebabkan semakin banyak lahan pertanian yang beralih peruntukan menjadi lahan non pertanian (perumahan, perkantoran, pusat bisnis, dll) | Terjadinya penurunan produksi hasil tanaman panhan dan hortikultura akibat semakin berkurangnya lahan |
| 2. | akses pemasaran dan permodalan produk unggulan pertanian | Peningkatan akses pemasaran dan permodalan produk unggulan pertanian | Terbatasnya akses pemasaran dan permodalan menyebabkan petani tidak dapat memperbesar skala usataninya sehingga pendapatan dan kesejahterannya cenderung konstan |
| 3. | Kualitas dan Kuantitas SDM Pertanian dan Perikanan | Rendahnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pertanian dan Perikanan | Rendahnya Kualitas SDM Pertanian dan Perikanan menyebabkan kurangnya kemampuan SDM untuk memanfaatkan teknologi dan berinovasi dalam upaya meningkatkan produksi. Terbatasnya jumlah SDM (kuantitas) pertanian dan perikanan menyebabkan sulitnya meningkatkan produksi pertanian/perikanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kemampuan daerah dalam memproduksi sendiri kebutuhan pangannya sehingga harus diimpor dari daerah lain. |
| 4. | Jaminan Bahan Pangan Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) | Tingginya tuntutan masyarakat akan bahan pangan yang “ASUH” yang masih belum diimbangi dengan keterjaminan akan bahan pangan yang “ASUH." | |
| 5. | Urban Farming | Pemanfaatan lahan terbuka (seperti pekarangan rumah) di perkotaan yang ada di sekitar masyarakat untuk usaha pertanian | Meningkatkan ketahanan pangan keluarga, mendukung program penanggulangan stunting, antisipasi inflasi, meningkatkan pendapatan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | Perubahan Iklim Global | Perubahan Iklim Global seperti cuaca ekstream, curah hujan yang tinggi, kekeringan, gelombang panas, dan badai tropis harus diwaspadai dan diantisipasi karena berdampak pada produksi pertanian | Menganggu ketersediaan pangan dan mengancam ketahanan pangan |
| 7. | Penyakit Menular Ternak | Pentingnya biosecurity dan pengawasan lalu-lintas ternak untuk mencegah penularan dan penyebaran penyakit menular ternak | PMK, ASF, Flu Burung jika tidak diantisipasi dapat menyebabkan kematian secara masal pada hewan ternak sehingga menimbulkan kerugian bagi peternak dan menyebabkan kelangkaan pasokan hasil ternak (seperti daging, telur, dsb) yang dapat memicu inflasi |
| 8. | Optimalisasi peran AVC, OC dan Raiser sebagai agrowisata | Penguatan Regulasi untuk mendukung AVC, OC dan Raiser sebagai kawasan agrowisata | Peningkatan PAD |
| 9. | Kualitas dan Kuantitas pakan ikan yang digunakan oleh kelompok pembudidaya ikan di Kota Pontianak | Tingginya harga pakan ikan komersil yang beredar di Kota Pontianak | Harga pakan ikan yang semakin tinggi menyebabkan pembudidaya ikan di wilayah Kota Pontianak mengurangi aktivitas produksinya atau kalaupun tetap berproduksi pembudidaya akan menggunakan pakan ikan yang memiliki kadar protein yang rendah disesuaikan dengan daya beli pembudidaya. Solusi pembuatan pakan ikan mandiri terbentur dengan sulitnya memperoleh bahan baku pembuatan pakan ikan. |
| 10. | Belum mencukupinya ketersediaan benih ikan yang berkualitas | Unit Pembenihan Rakyat di Wilayah Kota Pontianak masih banyak yang menggunakan induk yang belum disertifikasi | Benih yang diperoleh dari Induk ikan yang belum disertifikasi kualitasnya kurang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat mempengaruhi kelangsungan hidup benih dan waktu pemeliharaan yang lebih panjang dan akhirnya mempengaruhi peningkatan biaya |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | operasional pembudidayaan ikan |
| 11. | Pemberdayaan koperasi perikanan | Koperasi perikanan diharapkan dapat membantu mengatasi krisis permodalan bagi pelaku usaha budidaya ikan, penangkapan ikan, pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan pemasar hasil kelautan dan perikanan | Pelaku usaha kelautan dan perikanan memiliki keterbatasan dalam permodalan dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Hal ini sangat mempengaruhi konsistensi jumlah produksi baik itu budidaya, penangkapan, pengolahan maupun pemasaran hasil kelautan dan perikanan. |
| 12. | Kualitas dan kuantitas bahan baku yang tersedia bagi pelaku usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan | Bahan baku untuk kegiatan pengolahan hasil kelautan dan perikanan masih terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini terkait dengan jumlah produksi pelaku usaha budidaya perikanan dan pelaku usaha perikanan tangkap. | Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi pelaku usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan. |
| 13. | Mempromosikan resiliensi dan keberlanjutan dari sistem pangan global | Kombinasi perubahan iklim global dan gelombang pandemi yang menghantam seluruh dunia beberapa tahun belakangan ini memberikan dampak buruk bagi beberapa aspek kehidupan salah satunya adalah krisis pangan secara global. Krisis pangan secara global yang akhirnya akan berdampak pada ketahanan pangan. Untuk itu perlu dilakukan tindakan-tindakan yang dapat mendorong dan mempercepat terjadinya proses transformasi sistem pangan yang dapat meningkatkan daya tahan terhadap ketersediaan pangan dan kecukupan kalori dan protein. | Resiliensi dan keberlanjutan sistem pangan jika tidak terus diupayakan dalam jangka panjang dapat menyebabkan krisis pangan dan akhirnya bahaya kelaparan dapat terjadi. Pengembangan dan peningkatan sistem pangan di wilayah Kota Pontianak dapat dilakukan secara menyeluruh artinya tidak hanya mengembangkan di satu sektor tertentu melainkan juga di semua sektor antara lain pertanian, peternakan, dan perikanan. Pengembangan ketahanan pangan dapat terwujud jika promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan kemandirian pangan dapat terwujud. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14. | Perdagangan pertanian dan perikanan yang terbuka, adil, dapat diprediksi, dan transparan untuk keterjangkauan pangan | Kota Pontianak bukanlah daerah produksi pertanian dan perikanan sebagaimana beberapa kabupaten/ kota di wilayah Provinsi kalimantan Barat lainnya. Karakteristik wilayah yang berbentuk perkotaan menyebabkan ketersediaan pangan akan komoditas pertanian dan perikanan sebagian besar tergantung pada pasokan dari wilayah sekitarnya. Aturan dan kebijakan yang diterapkan di wilayah produsen/ pemasok akan mempengaruhi ketersediaan pangan di wilayah Kota Pontianak. | Antisipasi penerapan aturan dan kebijakan yang tidak terbuka, adil, terprediksi, dan transparan akan mempengaruhi ketersediaan bahan pangan khususnya yang berasal dari sektor pertanian dan perikanan. Berkurangnya pasokan akan menyebabkan peningkatan harga pangan dan pada akhirnya akan mempengaruhi inflasi di wilayah Kota Pontianak. |
| 15. | Pengembangan Pelaku Usaha Pertanian dan Perikanan yang inovatif melalui digitalisasi pertanian dan perikanan | Pemanfaatan teknologi dan inovasi termasuk digitalisasi pertanian dan perikanan berperan penting dalam mendorong peningkatan produksi secara berkelanjutan. Digitalisasi pertanian dan perikanan dapat menjadi pendorong bagi generasi muda dan perempuan agar berpartisipasi dalam kegiatan produktif dan berkontribusi bagi kemajuan sektor pertanian dan perikanan | Teknologi dan Inovasi sudah menjadi hal yang umum diera digitalisasi saat ini. Usaha globalisasi pertanian dan perikanan didukung dengan implementasi inovasi dan teknologi dalam setiap usaha peningkatan pertanian dan perikanan. Usaha ini juga mendorong peningkatan daya saing produk hasil pertanian dan perikanan di era globalisasi. |
| 16. | Tempat Pemotongan Hewan (TPH) Ilegal | Masih banyak ditemukan pemotongan hewan diluar RPH resmi dan TPH yang ditunjuk/rujukan pemerintah | Kualitas daging yang berasal dari TPH ilegal diragukan kehigienisannya karena tidak ada pemeriksaan kesehatan terhadap hewan ternak yang akan dipotong maupun daging hasil penyembelihan sebelum dikirim ke pasar. Berdampak juga pada penurunan PAD dari Retribusi Pemotongan Hewan di RPH Sapi milik pemerintah |

# BAB IV
# TUJUAN DAN SASARAN

## 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu – isu utama bidang pangan, pertanian dan perikanan di Kota Pontianak.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 adalah **"Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan"**. Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator *persentase laju PDRB sektor pertanian dan perikanan*, yaitu pertumbuhan produksi barang dan jasa pada sektor pertanian dan perikanan di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu.

### B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 adalah:

1. **Meningkatnya Ketahanan Pangan.**

   Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

a) Ketersediaan energi per kapita (Kkal/Kapita/Hari)
b) Ketersediaan protein per kapita (Gr/kapita/haru)
c) Peningkatan skor pola pangan harapan (konsumsi)

**2. Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

a) Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
b) Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
c) Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ton)

**3. Meningkatnya produktivitas tanaman pangan dan produksi tanaman hortikultura.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

1. Produktivitas tanaman pangan (Ku/Ha)
   a. Produktivitas Padi
   b. Produktivitas Ubi Kayu
   c. Produktivitas Keladi
2. Produksi tanaman hortikultura (Ton)
   a. Produksi Sayuran (Ton)
   b. Produksi Buah-buahan (Ton)
   c. Produksi Biofarmaka (Kg)

**4. Meningkatnya produksi hasil peternakan.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

a) Produksi daging ternak (Kg)

**Tabel IV.1**
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan | | Laju PDRB sektor pertanian dan perikanan | 2,5 | 2,75 | 3 |
| | | Meningkatnya Ketahanan Pangan | Ketersediaan energi perkapita (Kkal/ Kapita/ Hari) | 3010 | 3020 | 3030 |
| | | | Ketersediaan Protein per Kapita (Gr/ Kapita/ Hari) | 106 | 107 | 108 |
| | | | Skor pola pangan harapan (Konsumsi) | 86,5 | 87 | 87,5 |
| | | | | | | |
| | | Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan | Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | 663 | 676 | 690, 00 |
| | | | Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | 450 | 459 | 468 |
| | | | Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ton) | 1730 | 1764 | 1800 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan dan Produksi Tanaman Hortikultura | Produktivitas Tanaman Pangan : | | | |
| | | | - Produktivitas Padi (Ku/ Ha) | 37,31 | 37,49 | 37,60 |
| | | | - Produktivitas Ubi Kayu (Ku/ Ha) | 222,33 | 223,00 | 223,64 |
| | | | - Produktivitas Keladi (Ku/ Ha) | 141,68 | 142,10 | 143,08 |
| | | | | | | |
| | | | Produksi Tanaman Hortikultura : | | | |
| | | | - Produksi Sayuran (Ton) | 7.090,79 | 7.111,75 | 7.125,72 |
| | | | - Produksi Buah-buahan (Ton) | 23.550,00 | 23.667,00 | 23.783,00 |
| | | | - Produksi Biofarmaka (Kg) | 2.257.500,00 | 2.268.566,00 | 2.279.632,00 |
| | | | | | | |
| | | Meningkatnya produksi hasil peternakan | Produksi Daging Ternak | 6.103.847,13 | 6.164.885,60 | 6.226.534,46 |
| | | | | | | |

## 4.2 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/ pegawai yang lebih tinggi ke level unit/ pegawai yang lebih rendah. Cascading merupakan penyelarasan antara sasaran kinerja instansi yang diturunkan sampai ke sasaran kinerja pegawai pada setiap tingkat jabatan sehingga penilaian kinerja yang dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Cascading menjadi acuan, tanggung jawab dan ukuran kinerja mulai dari Kepala Dinas (esselon II) untuk Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, pejabat struktural (esselon III) untuk program, kegiatan dan subkegiatan serta pejabat struktural (esselon IV) untuk kegiatan dan subkegiatan.

Cascading kinerja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dapat di lihat pada tebel berikut :

## Tabel IV.2 : Cascading Kinerja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak

| Tujuan PD | Sasaran PD | Indikator Tujuan dan Sasaran PD | Program | Kinerja Program | Indikator Program | Kegiatan | Kinerja Kegiatan | Indikator Kegiatan | Sub Kegiatan | Kinerja Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan | | Laju PDRB sektor pertanian dan perikanan | | | | | | | | | | |
| | 1 Meningkatnya Ketahanan Pangan | 1 Ketersediaan energi perkapita<br>2 Ketersediaan Protein per Kapita<br>3 Skor pola pangan harapan | 1 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 1 Terwujudnya Stabilitas Pasokann dan Harga Pangan | 1 Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan | 1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan | 1 Terlaksanaya Pengawasan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 1 Jumlah laporan Pengawasan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 1 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | 1 Tersedianya informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | 1 Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan DPPP |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 Terwujudnya Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah Sesuai Standar | 2 Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah sesuai Standar | | | | 2 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | 1 Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | 1 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | |
| | | | | 3 Tercapainya Target Konsumsi Pangan | 3 Persentase Target Konsumsi Pangan | | | | 3 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 1 Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 1 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | |
| | | | | | | 2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah Kabupaten/ Kota | 1 Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah | 1 Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah | 1 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 1 Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kota | 1 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kota | |
| | | | | | | 3 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | 1 Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | 1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | 1 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | 1 Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | 1 Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | |
| | | | | | | | | | 2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal | 1 Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis | 1 Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Sumber daya Lokal | Sumber daya Lokal | |
| | | | 2 Program Penanganan Kerawanan Pangan | 1 Terwujudnya Peningkatan Tahan Pangan | 1 Persentase Peningkatan Tahan Pangan | 1 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota | 1 Terlaksanaanya Penanganan Kerawanan Pangan | 1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Kerawanan Pangan | 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | 1 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kota | 1 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kota | | |
| | | | 3 Program Pengawasan Keamanan Pangan | 1 Terwujudnya mutu pangan sesuai standar yang ditetapkan | 1 Persentase kasus pangan yang tidak sesuai standar mutu yang telah ditetapkan | 1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota | 1 Terlaksanaanya pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan | 1 Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan | 1 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 1 Menguatnya Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 1 KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina | | |
| | | | | | | | | | 2 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Teregistrasinya Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kota | 1 Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kota | | |
| | | | | | | | | | 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kota | 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kota | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan | 1 Produksi Perikanan Tangkap | 1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 1 Terlaksanaanya pengelolaan program perikanan tangkap | 1 Persentase Kelompok Usaha Bersama yang difasilitasi | 1 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangaan Air Lainnya Yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota. | 1 Terlaksanaanya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangaan Air Lainnya Yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota. | 1 Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangaan Air Lainnya Yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota. | 1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber daya Ikan | 1 Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota | 1 Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia | Bidang Perikanan DPPPP |
| | | 2 Produksi Perikanan Budidaya | | | | | | | 2 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | 1 Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | 1 Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | | | | | |
| | | 3 Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | | | | | | | 3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | 1 Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap | 1 Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | | | | | |
| | | | | | | 2 Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 1 Terlaksanaanya Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten /Kota | 1 Persentase Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | 1 Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil | 1 Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | 1 Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | 1 Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan pengembangan Kelembagaannya | |
| | | | 2 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 1 Terlaksananya pengelolaan program perikanan budidaya | 1 Persentase kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi | 1 Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil | 1 Terlaksananya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil | 1 Jumlah Kegiatan pembinaan dan pendampingan dalam rangka pengembangan usaha perikanan budidaya | 1 Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil | 1 Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 1 Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | |
| | | | | | | 2 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 1 Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 1 Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 1 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 1 Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | | | | 2 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 1 Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | | | | 3 Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ kota | 1 Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | 1 Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3 | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | 1 | Terlaksananya pengelolaan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | 1 | Persentase jumlah pelaku Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan yang difasilitasi | 1 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 1 | Terlaksananya Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil | 1 | Jumlah kegiatan pelayanan Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil | 1 | Pelaksanaan Bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil | 1 | Terlaksananya Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | 1 | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | |
| | | | | | | | | | 2 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 1 | Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota | 1 | Jumlah kegiatan penyedian dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 1 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 | Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | |
| | 3 | Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan dan Produksi Tanaman Hortikultura | 1 | Produktivitas Tanaman Pangan : | 1 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | 1 | Meningkatnya jumlah petani tanaman pangan dan hortikultura yang menggunakan agroinput pertanian sesuai anjuran/rekomendasi | 1 | Persentase petani tanaman pangan dan hortikultura yang menggunakan agroinput pertanian sesuai anjuran/ | 1 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 1 | Meningkatnya pengawasan penggunaan sarana pertanian | 1 | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 1 | Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi | 1 | Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 1 | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, teknologi dan spesifik lokasi | Bidang Pertanian DPPP |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | rekomendasi | | | | | | | | |
| | | - Produktivitas Padi | | 2 Meningkatnya jumlah kunjungan di UPTD Agribisnis | 2 Persentase peningkatan kunjungan di UPTD Agribisnis | | | | 2 Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian | 1 Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 1 Jumlah Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian | |
| | | - Produktivitas Ubi Kayu | | | | 2 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota | 1 Meningkatnya pengelolaan sumber daya genetik hewan, tumbuhan dan mikro organisme | 1 Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 1 Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 1 Jumlah Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Bidang Pertanian DPPP |
| | | - Produktivitas Keladi | | | | | | | 2 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 1 Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman | 1 Jumlah pelaksanaan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | UPT Agribisnis DPPP |
| | | 2 Produksi Tanaman Hortikultura : | 2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 1 Meningkatnya ketersediaan prasarana pertanian merupakan bahan berupa output yang dipergunakan untuk budidaya pertanian | 1 Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian | 1 Pembangunan Prasarana Pertanian | 1 Meningkatnya prasarana pertanian | 1 Jumlah Prasarana pertanian yang dibangun | 1 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani | 1 Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Usaha Tani | 1 Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara | Bidang Pertanian DPPP |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Produksi Sayuran<br>- Produksi Buah-buahan<br>- Produksi Biofarmaka | | 1 Terwujudmya Peningkatan Jumlah Ketersediaan Prasarana di UPT Agribisnis | 1 Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana di UPTD Agribisnis | | | | 2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 1 Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani | 1 Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan dipelihara | |
| | | | | | | | | | 3 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | 1 Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | 1 Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | |
| | | | | | | | | | 4 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 1 Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya | 1 Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | UPT Agribisnis DPPP |
| | | | 3 Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | 1 Terfasilitasinya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | 1 Persentase fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | 1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota | 1 Tertanganinya dengan tepat areal yang terdampak perubahan iklim dan OPT | 1 Luas areal yang dapat ditangani akibat dampak dari perubahan iklim dan OPT pada Tanaman Pangan dan Hortikultura | 1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 1 Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 1 Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | Bidang Pertanian DPPP |
| | | | | | | | | | 2 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 1 Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 1 Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 | Program Penyuluhan Pertanian | 1 | Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyuluh petani dan pelaku usaha | 1 | Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh, petani dan pelaku agribisnis | 1 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | 1 | Meningkatnya kegiatan penyuluhan pertanian | 1 | Jumlah Kegiatan Penyuluhan Pertanian | 1 | Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa | 1 | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 1 | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa | 1 | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 1 | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 | Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian | 1 | Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 1 | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | |
| | 4 | Meningkatnya produksi hasil peternakan | 1 | Produksi Daging Ternak | 1 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | 1 | Terlaksananya penyediaan dan pengembangan sarana peternakan | 1 | Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan | 1 | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 1 | Meningkatnya mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/ kota | 1 | Jumlah kegiatan pembinaan kelompok tani/ternak | 1 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | 1 | Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | 1 | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Bidang Peternakan DPPP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2 | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 1 | Terlaksanaanya pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/ kota | 1 | Jumlah Kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | 1 | Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, Bahan Pakan/Pakan | 1 | Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | 1 | Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | |
| | | | 2 | Program Perizinan Usaha Pertanian | 1 | terlaksananya pengawasan perizinan usaha obat hewan | 1 | Persentase peningkatan unit usaha pengecer obat hewan yang memiliki izin | 1 | Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan | 1 | Terlaksanaanya fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan di Kota Pontianak | 1 | Jumlah laporan fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan | 1 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan | 1 | Terlaksananya fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan di Kota Pontianak | 1 | Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang memenuhi Komitmen | |
| | | | 3 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 1 | Terlaksananya peningkatan pelayanan di RPH Sapi | 1 | Indeks kepuasan pelayanan RPH Sapi | 1 | Pembangunan Prasarana Pertanian | 1 | meningkatnya pemotongan ternak yang sesuai persyaratan teknis | 1 | Jumlah pemotongan ternak di RPH Sapi | 1 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan | 1 | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Rumah Potong Hewan | 1 | Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | UPT RPH Sapi DPPP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 1 | Terlaksananya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | 1 | Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 1 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 1 | Terlaksananya penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/ kota | 1 | Jumlah Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan | 1 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis | 1 | Terkendali dan Tertanggulangi nya Penyakit Hewan dan Zoonosis | 1 | Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Bidang Peternakan DPPP |
| | | | | | | | | | 2 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 1 | Terlaksananya pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/ kota | 1 | Jumlah pemeriksaan/pengobatan yang dilaksanakan | 1 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 1 | Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 1 | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | |
| | | | | | | | | | 3 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | 1 | Terlaksananya penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner | 1 | Jumlah penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | 1 | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | 1 | Terlaksananya Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | 1 | Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 1 | Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 1 | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | UPT RPH Sapi DPPP |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 3 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis | 1 Ditetapkannya Pemenuhan Persyaratan Teknis | 1 Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan | | |
| | | | | | | 4 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan | 1 Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan hewan | 1 Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan hewan | 1 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan | 1 Terlaksananya Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan | 1 Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan | | Bidang Peternakan DPPP |
| | | | | | | | | | | | | | |

# BAB V
# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk mencapaian tersebut diatas dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Berikut ini disajikan tabel yang mengemukakan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pada Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 2024-2026**

| Tujuan | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | |
| **Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan** | **1.** | **Meningkatnya Ketahanan Pangan** | **1.1** | Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan | **1.1.1** | Melaksanakan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kota dalam Rangka |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan |
| | | | | | **1.1.2** | Menyediakan Cadangan Pangan Daerah |
| | | | | | **1.1.3** | Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi |
| | | | **1.2** | Penanganan kerawanan pangan | **1.2.1** | Mengkoordinasikan dan Mensinkronisasikan Penanganan Kerawanan Pangan |
| | | | | | **1.2.2** | Melaksanakan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kota |
| | | | **1.3** | Pengawasan keamanan pangan | **1.3.1** | Melaksanakan Pengawasan Keamanan Pangan |
| | **2.** | **Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan** | **2.1** | Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap | **2.1.1** | Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Melalui Bantuan Sarana Perikanan Tangkap |
| | | | | | **2.1.2** | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Pelaku Usaha Perikanan Tangkap dan Kapasitas Kelembagaan |
| | | | **2.2** | Optimalisasi pengelolaan perikanan budidaya | **2.2.1** | Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil |
| | | | | | **2.2.2** | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2.3** | Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | **2.3.1** | Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil |
| | **3.** | **Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan,dan Produksi Tanaman Hortikultura** | **3.1** | Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | **3.1.1** | Meningkatkan Pengawasan penggunaan sarana prasarana pertanian |
| | | | | | **3.1.2** | Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | | **3.2** | Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | **3.2.1** | Meningkatkan Pembangunan Prasarana Pertanian |
| | | | **3.3** | Meningkatkan penyuluhan pertanian | **3.3.1** | Meningkatkan Pelaksanaan penyuluhan Pertanian |
| | **4.** | **Meningkatnya produksi hasil peternakan** | **4.1** | Meningkatkan dukungan kesehatan dan jumlah ternak untuk mendukung swasembada daging | **4.1.1** | Meningkatkan mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | | | **4.1.2** | Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah Kabupaten/Kota |
| | | | **4.2** | Optimalisasi pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | **4.2.1** | Meningkatkan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | daerah Kabupaten/Kota |
| | | | | | **4.2.2** | Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | | | **4.2.3** | Meningkatkan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan |

# BAB VI
# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2024-2026, memperhatikan: (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Kota Pontianak sampai dengan tahun 2026; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2020 - 2022; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Dokumen Renstra ini memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun ke depan yang lebih lanjut dijabarkan ke dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
    a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
    d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
    f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
    g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI dan KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
    a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan;
    b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah Kabupaten/ Kota;
    c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.
3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
    a. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota

4. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
   a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
5. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
   a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangaan Air Lainnya Yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota;
   b. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota.
6. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
   a. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil;
   b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
7. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
   a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
   b. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
8. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
   a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;
   b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota;
   c. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
   d. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
9. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
   a. Pembangunan Prasarana Pertanian.
10. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
    a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota.
11. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
    a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
12. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
    a. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan.
13. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
    a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota;

b. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota;
c. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner;
d. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan.

Dalam rangka mengimplementasikan program Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak yang telah ditetapkan, maka untuk dapat merealisasikannya perlu dilaksanakan kegiatan untuk periode tahun 20234 - 2026 yang mewadahinya. Selanjutnya, untuk mencerminkan program kegiatan menjadi suatu yang konkrit dan dapat diukur perlu adanya indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Pontianak secara makro. Adapun rincian program dan kegiatan serta indikator kinerja adalah sebagai berikut :

**Tabel VI.1 : Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak**

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan | | | | Laju PDRB sektor pertanian dan perikanan (%) | - | 2,50 | | 2,75 | | 3,00 | | 3,00 | DPPP | |
| | | | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan** | 100 | 95 | **10.243.664.257** | 95 | **10.361.957.306** | 95 | **10.706.903.838** | 95 | Sekretariat DPPP | |
| | | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (%)* | *100* | *100* | *53.227.532* | *100* | *68.000.000* | *100* | *78.880.000* | *100* | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 14 | 14 | 16.237.908 | 14 | 23.000.000 | 14 | 26.680.000 | 14 | | |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 35 | 35 | 36.989.624 | 35 | 45.000.000 | 35 | 52.200.000 | 35 | | |
| | | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)* | *100* | *100* | *8.310.546.600* | *100* | *8.061.655.584* | *100* | *8.186.521.277* | *100* | | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan) | 58 | 50 | 8.301.273.000 | 50 | 8.050.620.000 | 50 | 8.173.720.000 | 50 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 6 | 6 | 9.273.600 | 6 | 11.035.584 | 6 | 12.801.277 | 18 | | |
| | | | *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | *Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)* | *100* | *100* | *154.905.000* | *100* | *173.000.000* | *100* | *174.955.000* | *100* | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut (Paket) Kelengkapan | 1 | 3 | 91.950.000 | 3 | 110.000.000 | 3 | 110.000.000 | 9 | | |
| | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 58 | 50 | 14.955.000 | 50 | 15.000.000 | 50 | 14.955.000 | 50 | | |
| | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 58 | 8 | 48.000.000 | 8 | 48.000.000 | 8 | 50.000.000 | 24 | | |
| | | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (%)* | *100* | *100* | *297.301.871* | *100* | *372.488.450* | *100* | *378.132.450* | *100* | | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 12.568.895 | 1 | 12.750.000 | 1 | 13.000.000 | 3 | | |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 84.716.000 | 1 | 94.768.000 | 1 | 94.768.000 | 3 | | |
| | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 19.554.450 | 1 | 19.554.450 | 1 | 19.554.450 | 3 | | |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 19.870.000 | 1 | 19.870.000 | 1 | 19.870.000 | 3 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 40.306.000 | 1 | 44.606.000 | 1 | 45.000.000 | 3 | | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 2 | 2 | 5.940.000 | 2 | 5.940.000 | 2 | 5.940.000 | 6 | | |
| | | | Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 1 | 3 | 99.994.526 | 3 | 150.000.000 | 3 | 150.000.000 | 9 | | |
| | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 10 | 10 | 14.352.000 | 10 | 25.000.000 | 10 | 30.000.000 | 10 | | |
| | | | *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)* | *100* | - | - | *100* | *50.000.000* | *100* | *200.000.000* | *100* | | |
| | | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 58 | - | - | | | 50 | 50.000.000 | 50 | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 9 | - | - | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | | |
| | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | - | - | | | 1 | 100.000.000 | 1 | | |
| | | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)* | *100* | *100* | *1.105.793.254* | *100* | *1.290.281.196* | *100* | *1.341.883.035* | *100* | | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 1 | 1 | 8.568.000 | 1 | 8.568.000 | 1 | 8.568.000 | 3 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1 | 1 | 383.315.035 | 1 | 431.713.196 | 1 | 483.315.035 | 3 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 1 | 713.910.219 | 1 | 850.000.000 | 1 | 850.000.000 | 3 | | |
| | | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah (%)* | *100* | *100* | *321.890.000* | *100* | *346.532.076* | *100* | *346.532.076* | *100* | | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kedaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 21 | 21 | 230.860.000 | 21 | 230.860.000 | 21 | 230.860.000 | 21 | | |
| | | | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 62 | 50 | 13.750.000 | 50 | 12.925.000 | 50 | 12.925.000 | 50 | | |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 20 | 31 | 25.920.000 | 31 | 25.920.000 | 31 | 25.920.000 | 31 | | |
| | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) | 1 | 1 | 51.360.000 | 1 | 51.360.000 | 1 | 51.360.000 | 1 | | |
| | | | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit) | 1 | - | | 1 | 25.467.076 | 1 | 25.467.076 | 1 | | |
| | ***Meningkatnya Ketahanan Pangan*** | | | ***Ketersediaan energi perkapita (Kkal/kapita/hari)*** | ***2.962*** | ***3.010*** | | ***3.020*** | | ***3.030*** | | ***3.030*** | Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan DPPP | |
| | | | | ***Ketersediaan Protein per Kapita (Gr/Kapita/hari)*** | ***107,63*** | ***108*** | | ***109*** | | ***110*** | | ***110*** | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ***Skor pola pangan harapan*** | ***77,60*** | ***86,5*** | | ***87,0*** | | ***87,5*** | | ***87,5*** |
| | | **Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat** | **Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (%)** | 142,01 | 142,50 | **334.087.980** | 143,00 | **414.834.812** | 143,50 | **495.751.637** | 143,50 |
| | | | **Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah sesuai Standar (%)** | 47,50 | 20,00 | | 22,00 | | 24,00 | | 24,00 |
| | | | **Persentase Target Konsumsi Pangan (%)** | 98,95 | 99,00 | | 99,05 | | 99,10 | | 99,10 |
| | | *Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan* | *Jumlah laporan Pengawasan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)* | *12* | *12* | *155.387.980* | *12* | *155.387.980* | *12* | *155.387.980* | *36* |
| | | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Laporan) | 12 | 13 | 43.807.900 | 13 | 43.807.900 | 13 | 43.807.900 | 39 |
| | | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (Dokumen) | 15 | 12 | 79.188.800 | 12 | 79.188.800 | 13 | 79.188.800 | 37 |
| | | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | - | 2.000 | 32.391.280 | 2.000 | 32.391.280 | 2.000 | 32.391.280 | 6.000 |
| | | *Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah Kabupaten/ Kota* | *Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah (Laporan)* | *12* | *12* | *128.700.000* | *12* | *209.446.832* | *12* | *290.363.657* | *36* |
| | | Pengadaan Cadangan Pangan | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kota (Ton) | - | 11 | 128.700.000 | 17 | 209.446.832 | 24 | 290.363.657 | 24 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| *Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi* | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (Laporan)* | *2* | *2* | *50.000.000* | *2* | *50.000.000* | *2* | *50.000.000* | *6* |
| Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen) | 1 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 |
| Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal (Laporan) | - | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | 6 |
| **Program Penanganan Kerawanan Pangan** | **Persentase Peningkatan Tahan Pangan (%)** | 90,76 | 92,50 | **15.000.000** | 93,00 | **15.000.000** | 93,50 | **15.000.000** | 93,50 |
| *Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota* | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Kerawanan Pangan (Laporan)* | *6* | *4* | *15.000.000* | *4* | *15.000.000* | *4* | *15.000.000* | *12* |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kota (Laporan) | 12 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 36 |
| **Program Pengawasan Keamanan Pangan** | **Persentase kasus pangan yang tidak sesuai standar mutu yang telah ditetapkan (%)** | 19,30 | 18,00 | **75.895.348** | 17,50 | **75.895.348** | 17,00 | **75.895.348** | 17,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota* | *Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Kali)* | *4* | *12* | *75.895.348* | *12* | *75.895.348* | *12* | *75.895.348* | *36* | | |
| | | | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota yang Dibina (Dokumen) | - | 12 | 13.395.348 | 12 | 13.395.348 | 12 | 13.395.348 | 36 | | |
| | | | Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kota (Dukumen) | 6 | 6 | 20.000.000 | 6 | 20.000.000 | 6 | 20.000.000 | 18 | | |
| | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kota (Dokumen) | 1 | 1 | 42.500.000 | 1 | 42.500.000 | 1 | 42.500.000 | 3 | | |
| | ***Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan*** | | | ***Produksi Perikanan Tangkap (Ton)*** | ***723,37*** | ***721*** | | ***742*** | | ***764*** | | ***2.227*** | Bidang Perikanan DPPP | |
| | | | | ***Produksi Perikanan Budidaya (Ton)*** | ***223,68*** | ***235*** | | ***249*** | | ***264*** | | ***748*** | | |
| | | | | ***Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ton)*** | ***1.671*** | ***1.730*** | | ***1.764*** | | ***1.800*** | | ***5.294*** | | |
| | | | **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap** | **Persentase Kelompok Usaha Bersama yang difasilitasi (%)** | 118 | 100 | **54.000.000** | 100 | **93.000.000** | 100 | **105.000.000** | 100 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangaan Air Lainnya Yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.* | *Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangaan Air Lainnya Yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota (%)* | *100* | *100* | *45.000.000* | *100* | *68.000.000* | *100* | *70.000.000* | *100* | |
| | | | Penyediaan Data dan Informasi Sumber daya Ikan | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen) | 4 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | |
| | | | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit) | - | - | - | - | - | 1 | 5.000.000 | 1 | |
| | | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit) | 3 | 1 | 30.000.000 | 1 | 53.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | |
| | | | *Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota* | *Persentase Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota (%)* | *100* | *100* | *9.000.000* | *100* | *25.000.000* | *100* | *35.000.000* | *100* | |
| | | | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang) | 90 | - | - | 30 | 15.000.000 | 30 | 25.000.000 | 60 | |
| | | | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan pengembangan Kelembagaannya (Kelompok) | 2 | 2 | 9.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | |
| | | | **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya** | **Persentase kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi (%)** | 50 | 50 | **300.149.984** | 75 | **330.338.481** | 100 | **382.672.638** | 100 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil* | *Jumlah Kegiatan pembinaan dan pendampingan dalam rangka pengembangan usaha perikanan budidaya (Kali)* | *2* | *2* | *10.000.000* | *2* | *15.000.000* | *2* | *25.000.000* | *6* | |
| | | | Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok) | 87 | 30 | 10.000.000 | 30 | 15.000.000 | 30 | 25.000.000 | 90 | |
| | | | *Pengelolaan Pembudidayaan Ikan* | *Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (%)* | *100* | *100* | *290.149.984* | *100* | *315.338.481* | *100* | *357.672.638* | *100* | |
| | | | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit) | 1 | - | - | - | - | 3 | 15.000.000 | 3 | |
| | | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit) | 1 | 1 | 285.149.984 | 1 | 300.338.481 | 1 | 327.672.638 | 3 | |
| | | | Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ kota | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen) | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | |
| | | | **Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan** | **Persentase jumlah pelaku Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan yang difasilitasi (%)** | 83 | 100 | **10.000.000** | 100 | **10.000.000** | 100 | **15.000.000** | 100 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil* | *Jumlah kegiatan pelayanan Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil (Kali)* | *1* | *1* | *10.000.000* | *1* | *10.000.000* | *1* | *10.000.000* | *3* | | |
| | | | Pelaksanaan Bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha) | 2 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | | |
| | | | *Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota* | *Jumlah kegiatan penyedian dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Kali)* | *1* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1* | *5.000.000* | *1* | | |
| | | | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha) | - | - | - | - | - | 1 | 5.000.000 | 1 | | |
| | ***Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan dan Produksi Tanaman Hortikultura*** | | | ***Produktivitas Tanaman Pangan :*** | | | | | | | | | ***Bidang Pertanian dan UPT Agribisnis DPPP*** | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ***- Produktivitas Padi (Ku/Ha)*** | ***36,94*** | ***37,31*** | | ***37,49*** | | ***37,60*** | | ***37,60*** | | |
| | | | | ***- Produktivitas Ubi Kayu (Ku/Ha)*** | ***219,69*** | ***222,33*** | | ***223,00*** | | ***223,64*** | | ***223,64*** | | |
| | | | | ***- Produktivitas Keladi (Ku/Ha)*** | ***140*** | ***141,68*** | | ***142,10*** | | ***143,08*** | | ***143,08*** | | |
| | | | | ***Produksi Tanaman Hortikultura :*** | | | | | | | | | | |
| | | | | ***- Produksi Sayuran (Ton)*** | ***-*** | ***7.090,79*** | | ***7.111,75*** | | ***7.125,72*** | | ***7.125,72*** | | |
| | | | | ***- Produksi Buah-buahan (Ton)*** | ***-*** | ***23.550*** | | ***23.667*** | | ***23.783*** | | ***23.783*** | | |
| | | | | ***- Produksi Biofarmaka (Kg)*** | ***-*** | ***2.257.500*** | | ***2.268.566*** | | ***2.279.632*** | | ***2.279.632*** | | |
| | | | **Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian** | **Persentase petani tanaman pangan dan hortikultura yang menggunakan agroinput pertanian sesuai anjuran/ rekomendasi (%)** | 20 | 30 | **1.118.211.984** | 40 | **1.233.000.000** | 50 | **1.307.967.437** | 50 | Bidang Pertanian DPPP | |
| | | | | **Persentase peningkatan kunjungan di UPTD Agribisnis (%)** | 15 | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | UPT Agribisnis DPPP | |
| | | | *Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian* | *Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Laporan)* | *3* | *8* | *157.396.784* | *8* | *170.000.000* | *8* | *230.000.000* | *24* | Bidang Pertanian DPPP | |
| | | | Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian | Jumlah Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian (Laporan) | 4 | 4 | 157.396.784 | 4 | 170.000.000 | 4 | 230.000.000 | 12 | | |
| | | | *Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota* | *Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)* | *2* | *16* | *960.815.200* | *16* | *1.063.000.000* | *16* | *1.077.967.437* | *48* | Bidang Pertanian DPPP | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) | 1 | 12 | 630.000.000 | 12 | 730.000.000 | 12 | 780.000.000 | 36 | UPT Agribisnis DPPP |
| Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Jumlah pelaksanaan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) | 1 | 4 | 330.815.200 | 4 | 333.000.000 | 4 | 297.967.437 | 12 | Bidang Pertanian DPPP |
| **Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian** | **Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian (%)** | 12 | 20 | **233.291.632** | 30 | **316.772.603** | 40 | **658.536.220** | 40 | Bidang Pertanian DPPP |
| | **Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana di UPTD Agribisnis (%)** | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 6 | UPT Agribisnis DPPP |
| *Pembangunan Prasarana Pertanian* | *Jumlah Prasarana pertanian yang dibangun (Unit)* | *2* | *6* | *233.291.632* | *9* | *316.772.603* | *9* | *658.536.220* | *9* | Bidang Pertanian DPPP |
| Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit) | 2 | - | - | 1 | 26.655.561 | 1 | 32.280.451 | 2 | |
| Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan dipelihara (Unit) | 1 | - | - | - | - | 1 | 230.000.000 | 1 | |
| Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 4 | 2 | 80.000.000 | 2 | 88.000.000 | 2 | 95.000.000 | 2 | |
| Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 1 | 1 | 153.291.632 | 2 | 202.117.042 | 2 | 301.255.769 | 5 | UPT Agribisnis DPPP |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian** | **Persentase fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (%)** | - | 50 | **-** | 60 | **55.000.000** | 70 | **40.000.000** | 70 | | |
| | | | *Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota* | *Luas areal yang dapat ditangani akibat dampak dari perubahan iklim dan OPT pada Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ha)* | - | - | - | *20* | *55.000.000* | *20* | *40.000.000* | *40* | | |
| | | | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha) | | - | - | 10 | 35.000.000 | 10 | 20.000.000 | 20 | Bidang Pertanian DPPP | |
| | | | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha) | | - | - | 10 | 20.000.000 | 10 | 20.000.000 | 20 | | |
| | | | **Program Penyuluhan Pertanian** | **Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh, petani dan pelaku agribisnis (%)** | 10 | 20 | **458.070.000** | 30 | **473.000.000** | 40 | **488.000.000** | 40 | | |
| | | | *Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian* | *Jumlah Kegiatan Penyuluhan Pertanian (Kegiatan)* | *7* | *11* | *458.070.000* | *11* | *473.000.000* | *11* | *488.000.000* | *33* | | |
| | | | Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | 2 | 2 | 412.700.000 | 2 | 418.000.000 | 2 | 423.000.000 | 2 | | |
| | | | Pengembangan kapasitas kelembagaan petani | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang | 7 | 3 | 45.370.000 | 4 | 55.000.000 | 5 | 65.000.000 | 12 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | di kecamatan dan desa | Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | | | | | | | | | |
| ***Meningkatnya produksi hasil peternakan*** | | | ***Produksi Daging Ternak (Kg)*** | ***5.714.774,26*** | ***6.103.847*** | | ***6.164.886*** | | ***6.226.534*** | | ***6.226.534*** | Bidang Peternakan dan UPT RPH Sapi DPPP |
| | | **Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian** | **Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan (%)** | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | Bidang Peternakan DPPP |
| | | *Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota* | *Jumlah kegiatan pembinaan kelompok tani/ternak (Kali)* | *27* | *4* | | *4* | | *4* | | *12* | |
| | | Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan) | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| | | *Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota* | *Jumlah Kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (Kali)* | *4* | *12* | | *12* | | *12* | | *36* | |
| | | Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, Bahan Pakan/ Pakan | Jumlah Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan (Laporan) | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| | | **Program Perizinan Usaha Pertanian** | **Persentase peningkatan unit usaha pengecer obat hewan yang memiliki izin (%)** | - | 100 | **10.000.000** | 100 | **11.000.000** | 100 | **12.100.000** | 100 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan* | *Jumlah laporan fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan (Laporan)* | *-* | *1* | *10.000.000* | *1* | *11.000.000* | *1* | *12.100.000* | *3* | | |
| | | | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan | Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang memenuhi Komitmen (Laporan) | - | 4 | 10.000.000 | 4 | 11.000.000 | 4 | 12.100.000 | 12 | | |
| | | | **Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian** | **Indeks kepuasan pelayanan RPH Sapi (Nilai)** | 90 | 95 | **4.195.341.648** | 95 | **423.636.561** | 95 | **480.078.411** | 95 | UPT RPH Sapi DPPP | |
| | | | *Pembangunan Prasarana Pertanian* | *Jumlah pemotongan ternak di RPH Sapi (Ekor* | *2.176* | *2.200* | *4.195.341.648* | *2.500* | *423.636.561* | *3.000* | *480.078.411* | *7.700* | | |
| | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan | Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 1 | 1 | 4.195.341.648 | 1 | 423.636.561 | 1 | 480.078.411 | 1 | | |
| | | | **Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner** | **Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (%)** | 30 | 30 | **802.655.167** | 30 | **958.279.889** | 30 | **1.111.909.471** | 90 | Bidang Peternakan DPPP | |
| | | | *Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota* | *Jumlah Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan (Kegiatan)* | *2* | *3* | *346.902.800* | *3* | *381.593.080* | *3* | *419.752.388* | *9* | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis | Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Laporan) | 1 | 4 | 346.902.800 | 4 | 381.593.080 | 4 | 419.752.388 | 12 | | |
| | | | *Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota* | *Jumlah pemeriksaan/pengobatan yang dilaksanakan (Laporan)* | *4* | *4* | *223.969.967* | *4* | *308.226.169* | *4* | *384.700.379* | *12* | | |
| | | | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan) | 1 | 4 | 223.969.967 | 4 | 308.226.169 | 4 | 384.700.379 | 12 | | |
| | | | *Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner* | *Jumlah penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Laporan)* | *1* | *1* | *153.192.400* | *1* | *182.011.640* | *1* | *212.362.804* | *3* | | |
| | | | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan (Laporan) | 1 | 4 | 10.000.000 | 4 | 11.000.000 | 4 | 12.100.000 | 12 | | |
| | | | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan) | - | - | - | 2 | 13.500.000 | 4 | 27.000.000 | 6 | UPT RPH Sapi DPPP | |
| | | | Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis | Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan (Laporan) | 1 | 4 | 143.192.400 | 4 | 157.511.640 | 4 | 173.262.804 | 12 | Bidang Peternakan DPPP | |
| | | | *Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan* | *Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan hewan (Laporan)* | *1* | *1* | *78.590.000* | *1* | *86.449.000* | *1* | *95.093.900* | *3* | | |
| | | | Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan | Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan (Laporan) | 2 | 4 | 78.590.000 | 4 | 86.449.000 | 4 | 95.093.900 | 12 | | |
| | | | | | | **JUMLAH PAGU** | **17.850.368.000** | | **14.771.715.000** | | **15.894.815.000** | | | |

# BAB VII
# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Indikator kinerja Perangkat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung merefleksikan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi terkait kepemimpinan dan prestasi yang terjadi dalam tubuh organisasi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran program dan kegiatan pembangunan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat dicapai sesuai harapan.

Dalam RPD Kota Pontianak, telah dirumuskan tujuan dan sasaran, di mana tujuan Terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing disertai penghidupan yang layak dan pemerataan kesejahteraan memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak. Sehingga, pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pontianak 2024-2026 melalui program dan kegiatan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dapat diukur melalui indikator dan target kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Pontianak 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel VII.1 : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

| NO | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran Strategis OPD | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan | Laju PDRB sektor pertanian dan perikanan (Persen) | | | | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,00 |
| | | | Meningkatnya Ketahanan Pangan | Ketersediaan energi perkapita (Kkal/ Kapita/ Hari) | 2.962,00 | 3.010,00 | 3.020,00 | 3.030,00 | 3.030,00 |
| | | | | Ketersediaan Protein per Kapita (Gr/ Kapita/ Hari) | 107,63 | 108,00 | 109,00 | 110,00 | 110,00 |
| | | | | Skor pola pangan harapan (Konsumsi) | 77,60 | 86,50 | 87,00 | 87,50 | 87,50 |
| | | | Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan | Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | 723,37 | 663,00 | 676,00 | 690, 00 | 1339,00 |
| | | | | Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | 223,68 | 235,00 | 249,00 | 264,00 | 748,00 |
| | | | | Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ton) | 1.671,40 | 1.730,00 | 1.764,00 | 1.800,00 | 5.294,00 |
| | | | Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan dan Produksi Tanaman Hortikultura | Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha) : | | | | | |
| | | | | - Produktivitas Padi | 36,94 | 37,31 | 37,49 | 37,60 | 37,60 |
| | | | | - Produktivitas Ubi Kayu | 219,69 | 222,33 | 223,00 | 223,64 | 223,64 |
| | | | | - Produktivitas Keladi | 140,00 | 141,68 | 142,10 | 143,08 | 143,08 |
| | | | | Produksi Tanaman Hortikultura (Ton): | | | | | |
| | | | | - Produksi Sayuran | | 7090,79 | 7111,75 | 7125,72 | 7125,72 |
| | | | | - Produksi Buah-buahan | | 23.550,00 | 23.667,00 | 23.783,00 | 23.783,00 |
| | | | | - Produksi Biofarmaka | | 2257500 | 2268566 | 2279632 | 2279632 |
| | | | Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan | Produksi Daging Ternak (Kg) | 5.714.774,26 | 6.103.847,13 | 6.164.885,60 | 6.226.534,46 | 6.226.534,46 |
| | | | | | | | | | |

# BAB VIII
# PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Periode Tahun 2024-2026 menyesuaikan Rencana Pembangunan Kota Pontianak, dan Rencana Pembangunan Nasional terutama yang relevan dengan pembangunan pangan, pertanian dan perikanan. Oleh karena itu Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Periode Tahun 2024-2026 ini sebagian memuat program kerja periode pemerintahan sebelumnya. Seperti yang kita pahami bahwa Rencana Strategis ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Kota Pontianak 3 (tiga) tahun yang akan datang sesuai sasaran, strategi serta program/ kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan adanya Renstra ini akan menjadi Dokumen Perencanaan dan acuan kerja bagi seluruh jajaran Bidang di Lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak. Secara lebih spesifik, penjabaran mengenai Renstra Tahun 2024-2026 ini diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk tahun - tahun mendatang

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, dalam melaksanakan seluruh kegiatannya akan mengacu kepada Renstra yang telah disusun bersama komponen dinas yang terkait. Konsekuensinya komitmen yang tinggi harus diberikan dalam tahap pelaksanaanya, baik oleh seluruh komponen Pemerintah Kota Pontianak maupun segenap lapisan masyarakat (petani, pihak swasta serta pihak lain yang terkait).

Guna mencapai hasil yang optimal, sangat diharapkan ada tindak lanjut dari rumusan Renstra ini. Apabila terdapat kegiatan yang pelaksanaanya belum berjalan optimal, padahal kegiatan tersebut erat kaitannya dengan misi pembangunan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Pontianak yang seharusnya berjalan sesuai dengan rencana menjadi tidak terformulasikan dengan baik.

Untuk itu sekali lagi sangat dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh stake holder yang terkait, bahwa berhasilnya pembangunan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Pontianak juga menuntut peran serta aktif dari berbagai pihak, serta Pemerintah Kota juga harus mampu memfasilitasi dan mengkoordinir seluruh proses yang ada dengan memberikan pelayanan yang kondusif. Jika kondisi ini dapat diciptakan, maka suatu sinergi yang ideal akan terbentuk yang pada akhirnya akan mempertinggi akselerasi Kota Pontianak.

WALI KOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO